

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN AGRO KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: 24 (dua puluh empat)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 13 September 2022
Waktu	: Pukul 13.50 s.d.15.55 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat	: Bambang Haryadi, S.E (F.P-Gerindra / Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara	: Penjelasan mengenai tata kelola industri CPO dan minyak goreng.
Hadir	: 34 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Bambang Haryadi, S.E/F.P- Gerindra/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
2. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H.

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 orang anggota dari 11 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
6. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
7. Ismail Thomas, S.H, M.Si
8. Bambang DH.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H.M. Ridwan Hisyam.
2. Drs. Mukhtarudin.
3. Ir. Lamhot Sinaga.

4. Bambang Hermanto, S.E.
5. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang anggota dari 6 anggota:

1. R. Wulansari
2. Ramson Siagian
3. Katherine A. Oendoen
4. H. Nurzahedi, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
3. Rian Firmansyah, S.Pd.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.
2. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo.
2. Muhammad Nasir
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.
4. Rusda Mahmud.
5. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Rofik Hananto, S.E.
2. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I
3. Dipl. Ing Hj. Diah Nurwitasari, MI.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang anggota dari 1 anggota:

1. Drs. H. Anwar Idris

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Putu Juli Ardika (Dirjen Agro Kemenperin)
2. Thomas (PT Wilmar Group)
3. Irwan Tirtawijaya (PT Smart)
4. Gunawan Siregar (PT Musim Mas Group)
5. Manumpak Manurung (PT Apical Group)
6. Rendy (PT Permata Hijau Group)

7. Franky Welirang (PT Salim Group)
8. PT BKP Group
9. Lai Lai (PT Gama)
10. PT Wings Group
11. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI)
(Eddy Martono)
12. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia
(GIMNI) (Gunawan Siregar)
13. Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia
(AIMI)
14. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
(GAPKI)
15. Perwakilan Perusahaan Minyak Goreng

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKL KETUA KOMISI VII):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII, yang hadir secara virtual Bapak Ketua kebetulan Ketua kami sedang terpapar Covid dan insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa beraktivitas kembali.

Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual.

Dan yang kami hormati Bapak Dirjen Agro Bapak Putu dari Kementerian Perindustrian RI beserta seluruh jajarannya.

Dan tak lupa yang kami hormati dan kami muliakan terhadap mitra kami yang dibawa oleh Pak Dirjen Agro, 10 Direktur Utama Perusahaan Minyak Goreng dan hadirin sekalian.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak kepada para produsen minyak goreng minyak ini yang sudah menyediakan hadir. Sebelumnya saya sampaikan dulu ya kepada teman-teman ini kehadiran, ini boleh saya absen satu-satu Pak karena biar jelas semua kan.

1. PT Wilmar Group dihadirin oleh Bapak Thomas betul ya, presiden direktur Presdir Distribution ya.
2. Smart dari Sinar Mas, Pak Irwan Tirtawijaya Presiden Direktur.
3. PT Musim Mas Group, Pak Gunawan Siregar, baik Pak, Managing Director.
4. PT Apical Group, Pak Manumpak Manurung, kuasa direksi ya Pak.
5. PT Permata Hijau Group, *head office* Jakarta Bapak Rendy di depan aja Pak mungkin Pak, jangan di belakang nggak apa-apa karena mewakili perusahaan.
6. Inkasih Group, kosong ya.

7. Salim Group, Pak Franky, di depan aja Pak biar enak, ga papa Pak.
8. PT BKP, di isi di depan Pak biar ini, ntar dipikir dibeda-bedakan lagi, Wilmar didepan, Smart di depan, sama Pak, ga papa Pak, kalo emang muat didepan, BKP Grup ada ya? Ow belum datang.
9. KPN atau Gama Group atau Pak Lai Lai oh siap di depan Pak biar ini Pak.
10. PT Wings Group, monggo di depan Pak.

Dari 10 perusahaan hanya satu yang belum menghadiri ya, mudah-mudahan hadir PT BKP Group.

Yang selanjutnya dari asosiasi ini ada, selain ini kita mengundang asosiasi mohon maaf tadi ini. Yang kami hormati Asosiasi-asosiasi:

1. DMSI Dewan Minyak Sawit Indonesia, kosong ya.
2. GAPKI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit, baik Pak Edi Martono, Sekjenya Pak ya, terima kasih.
3. GIMNI Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, ketua umumnya Pak Gunawan Siregar. Pak Gunawan berarti merangkap di ini ya Pak ya di Musim Mas ya.
4. AIMI Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia, oh baik Pak Wisnoko ya.

Baik, dari asosiasi hadir semuanya hanya DMSI yang tidak hadir. Untuk selanjutnya kita lanjutkan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dan juga Rapat Dengar Pendapat Umum secara fisik maupun virtual, guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, maka pada hari ini Selasa 13 September 2022 Komisi VII akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian RI, yang menghadirkan para direktur atau perwakilan 10 perusahaan industri minyak goreng dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda pemenuhan kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat atau menyampaikan detail produksi penyaluran CPO dan minyak goreng, serta luas wilayah yang dikelola.

Berdasarkan data dari Sekretariat Anggota Komisi VII yang telah hadir berjumlah 25 anggota dari 51 anggota Komisi VII, yang terdiri atas 8 fraksi dari total 9 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi.

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup oleh karena itu izinkan saya atas nama Pimpinan meminta persetujuan Anggota agar rapat ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah dapat disetujui?

Atas persetujuan Anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT:SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.50 WIB)

Sebelum melanjutkan Rapat ini kami minta persetujuan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII bahwa Rapat ini selesai pada pukul 16.00 dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan bersama, setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Minyak goreng merupakan komoditas strategis industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketersediaannya memiliki peran penting bagi aspek sosial dan ekonomi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil, perlu mengatur penyediaan minyak goreng curah.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa Kementerian Perindustrian RI secara serius menangani persoalan minyak goreng ini. Namun bagi para pelaku usaha juga mengalami kebingungan dikarenakan sering terjadi perubahan dalam peraturan yang diterbitkan.

Beberapa Peraturan Menteri Perindustrian Tahun 2022, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 dan yang terakhir
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Minyak Goreng Curah.

Oleh karena itu Komisi VII DPR RI ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait tata kelola yang dilakukan selama ini dan rencana perbaikan tata kelola CPO dan turunannya. Tentu kami juga berharap kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan kecukupan serta harga yang wajar.

Selanjutnya untuk efektifnya waktu pembahasan, kami persilakan kepada Bapak Putu selaku Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian untuk dapat menyampaikan pemaparan untuk kita semua dapat memperkaya informasi terkait distribusi dan penyediaan minyak goreng itu.

Maka untuk itu kami persilahkan kepada Pak Putu, Pak Dirjen untuk dapat menyampaikan paparannya dan selanjutnya diikuti oleh para Dirut-Dirut serta asosiasi.

Waktu dan tempat kami persilahkan.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI (PUTU):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII, dalam hal ini yang hadir Pak Bambang Haryadi dan juga secara *online* Pak Sugeng Suparwoto.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Asosiasi Industri Minyak Nabati dan juga Pimpinan Industri Minyak Goreng.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Shalom.

Om swastiastu.

Namo buddhaya dan salam kebajikan.

Perkenankan kami memaparkan tentang industri kelapa sawit ya CPO dan hilirisasinya. Kami mulai dari pada peran strategisnya industri CPO dan hilirisasi, yang secara kualitatif industri ini sangat membantu di dalam pusat-pusat ekonomi di luar Pulau Jawa dan juga aktivitas produktif di daerah-daerah, terutama daerah 3T yaitu terluar, tertinggal dan terpencil dan menjaga kedaulatan ekonomi, dalam hal ini adalah substitusi impor dan juga menemukan aglomerasi atau kawasan industri baru berbasis sawit. Ini ada di Dumai, Simakip, Pulau Tanjung, Tarjun, Bitung dan sebagainya.

Untuk kontribusi kualitatifnya dapat kami laporkan bahwa industri CPO dan turunannya ini menyerap kurang lebih 5,2 juta orang atau menghidupi sekitar 20 juta orang. Dan nilai ekonomi hulu hilirnya itu diperkirakan sekitar 750 triliun, dimana nilai ekspornya itu dicapai 2021 itu sekitar 35,79 miliar US dolar atau sekitar kurang lebih 500 triliun.

Jadi kontribusi pajak terhadap PDB ini cukup besar 3,5% dan pendapatan pajaknya itu sekitar 20 triliun, serta pungutan ekspor dan bea keluar itu kurang lebih 86 triliun.

Bapak/Ibu Komisi VII yang saya hormati.

Industri hilirisasi CPO ini cukup berhasil ya kalau kita lihat dari ragam jenis produk yang dihasilkan. Pada tahun 2011 ini kita baru bisa memproduksi 54 jenis produk dan di tahun 2021 ini sudah mencapai 168 jenis produk.

Dan juga kalau tahun 2010, 60% kita ekspor dalam bentuk bahan baku CPO, pada tahun 2021 diekspor dalam bentuk CPO sudah sangat kecil yaitu 9,27% jadi sebagian besar sudah dihilirisasi dan kalau kita lihat nilai tambahnya itu cukup besar, baik itu bio diesel fame ini sekitar 1,14 kali daripada CPO-nya. Kalau kita lihat margarin dan lemak sekitar 1,86 kalinya dan minyak goreng 1,31 dan yang cukup besar adalah surfaktan ini sekitar 2,66 kali dan kosmetik ini 3,88 hampir 4 kalinya dari CPO.

Kebijakan pengembangan dan langkah konkret Kementerian Perindustrian adalah mengembangkan *food fitonutrient, fine chemical, fuel liquid* dan *fiber biomass*.

Ini akan sangat membantu memperluas kegiatan ekonomi produktif dan juga akan sangat membantu di dalam meningkatkan neraca perdagangan dan tadi menggerakkan daerah-daerah produsen kelapa sawit dan juga sangat berperan nantinya didalam mengendalikan emisi gas rumah kaca, serta kedaulatan pangan dan energi dan juga akan mendapatkan keuntungan dalam operasi hulu-hilir yang ramah lingkungan dan lestari serta berkelanjutan.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan sedikit tentang data-data statistik terkait dengan CPO dan turunannya. Dari data yang ada itu luas lahan kelapa sawit ini 16,3 juta hektar yang tersebar di 26 provinsi penghasil kelapa sawit. Komposisi perkebunan yang ada yaitu perkebunan perusahaan itu kurang lebih 58% dan perkebunan rakyat 42%.

Produksi CPO ini peningkatannya tidak banyak karena beberapa tahun terakhir moratorium, sehingga pada tahun 2019 ini kurang lebih CPO yang dihasilkan adalah 47,18 juta ton, 2021 itu kurang lebih 48,9 juta ton.

Pangsa pasar ekspor, ini cukup besar ke China yaitu sekitar 4,9 juta ton, India 2,96 juta ton, Uni Eropa ini ada 27 negara sekitar 3,45 juta ton, negara Afrika 2,14 juta ton, Pakistan 1,99 juta ton, negara Timur Tengah 1,59 juta ton, Amerika Serikat 1,39 juta ton dan Bangladesh sekitar 0,95 juta ton.

Kalau kita lihat untuk neracanya, jadi *supply-demand*-nya ini *demand* lokalnya itu dari yang dihasilkan CPO 4,7 di tahun 2019, ini sebagian besar adalah untuk ekspor yaitu 16,7 juta ton itu adalah untuk dalam negeri dan 37,4 juta ton untuk ekspor.

Dan perkembangannya hampir konstan walaupun ada peningkatan di sisi ekspor yaitu posisinya sekitar 30 untuk dalam negeri dan 65 atau 70 di sisi untuk ekspor.

Kalau kita lihat Bapak/Ibu yang saya hormati, ini perkembangan pengguna CPO dan turunannya. Untuk sektor makanan yaitu sekitar 19% dan ini tumbuh 1,5%, sektor energi itu 16% tumbuh 2%, oleo *chemical demand*-nya masih kecil yaitu 4% tapi pertumbuhannya cukup tinggi yaitu 7%. Ekspor CPO tadi 12% sekitar tumbuh 1,5% dan ekspor hilir kelapa sawit itu 49% dengan pertumbuhan 3%.

Jadi Bapak/Ibu, tahun 2021 ini konsumsi, konsumsinya sekitar 52 juta ton per tahun dan diproyeksikan akan terus tumbuh sampai dengan tahun 2045 menjadi 2 kalinya atau 101,9 juta ton per tahun. Ini mungkin nanti perlu peningkatan, baik itu intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Struktur industri hilir kelapa sawit dan turunannya, ini kami gambarkan ya sampai saat ini produksi minyak goreng sawit ini sudah *over* produksi, jadi melebihi. Jadi sebagian besar kita ekspor, kalau di gambar ini untuk ekspor RBD Palm Olien itu mencapai, ini 2021 mencapai 14,16 juta kiloliter. Sedangkan untuk yang digunakan dalam negeri itu sekitar 8,3 juta kiloliter.

Selanjutnya profil industri minyak goreng sawit dapat kami laporkan, ini jumlah industrinya itu ada 104 pabrik dan juga ada pabrik *packer* itu sekitar 137. Produksi minyak goreng sawit sendiri itu 22,4 juta kiloliter, jadi kalau kita lihat di kinerja ekspornya itu 11,80 juta ton atau setara 13,13 juta kiloliter.

Ini perolehan devisa dari minyak goreng sawit ini mencapai 12,25 miliar US dolar. Kebutuhan dalam negerinya itu 5,8 juta kiloliter atau 25,8% dari produksi dalam negeri, jadi sebagian besar sebenarnya ini ke pasar.

Kapasitas yang minyak goreng ini industrinya 43,36 juta kiloliter, kalau kita lihat konsumsi per kapita itu sekitar 11-12 liter per kapita per tahun.

Dapat kami sampaikan Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati. Jadi CPO Bapak/Ibu, CPO di KBRI 10431 ini masih berada pada dibina oleh Kementerian Pertanian, ini sudah CPO. Sekarang yang hadir ini sebagian adalah perusahaan-perusahaan yang mengolah CPO itu menjadi minyak goreng yaitu minyak nabati.

Kami sampaikan pula ini sebaran pabrik minyak goreng sawit Pak, jadi minyak goreng sawit itu tersebar di Sumatera, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, sebagian itu sudah tumbuh di Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Jadi kalau kita lihat kapasitasnya itu memang ada daerah-daerah yang surplus kapasitas dibandingkan dengan kebutuhannya.

Jadi pemerataan distribusi tadi, distribusi minyak gorengnya memang perlu *effort* tersendiri karena keberadaan pabrik minyak goreng dan pengepakannya, serta kebutuhannya yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Bapak/Ibu.

Seperti tadi sudah disampaikan memang aturan-aturan yang terkait dengan tata kelola minyak goreng ini sebenarnya ada dua yang sangat, yang ingin kami sampaikan disini. Yang pertama adalah program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi, ini dimulai 15 Maret sampai dengan 31 Mei. Di akhir Mei ini ada perubahan kebijakan yaitu dikembalikan kepada Kementerian Perdagangan, itu terkait dengan wajib pasok dalam negeri.

Sampai dengan saat ini kita mengelola minyak goreng untuk masyarakat ini berdasarkan atas aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan sejak akhir bulan Mei dan sejak awal Juni, ini kita sudah mengacu ke sana dan kami dari Kementerian Perindustrian itu lebih kepada sebagai pendukung untuk pendataan pabrik CPO yang ikut dalam wajib suplai dalam negeri dan juga minyak goreng, pabrik minyak goreng yang ikut dalam program minyak goreng rakyat.

Untuk penyaluran minyak goreng curah bersubsidi yang tanggal 16 di halaman 12, ini dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 kita sering disebut program Simirah1, ini produsen sudah menyalurkan 479.000 ton dan sudah diterima oleh distributor itu 474.000 ton dan pengecer, data-data yang udah sampai di pengecer itu 438,87 ton yang sudah diterima dengan catatan yang lengkap.

Selanjutnya Bapak/Ibu, di halaman 13 ya kami sampaikan keterpenuhan penyaluran minyak goreng bersubsidi ini untuk Pulau Jawa dan Bali itu sebagian besar sebenarnya Jawa Barat, DKI Jakarta dan Bali ini sudah di atas kebutuhannya yang memang Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten ini catatannya memang masih di bawah, terutama untuk di Yogyakarta.

Yogyakarta rendah ini bukan berarti minyaknya tidak ada Bapak/Ibu saya mohon izin, ini karena memang tidak ada distributor utama di sana, yang ada adalah besar distributor tapi didalam sistem dia tidak begitu kelihatan.

Demikian juga yang di Banten seperti itu, sementara yang di luar Pulau Jawa ini sudah cukup bagus cuma beberapa daerah di Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan juga Kalimantan Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur ini suplai kemarin masih belum bagus. Jadi reratanya masih belum bagus, distribusi kesana karena masalah transportasi.

Dari pemantauan Satgas pangan Bapak/Ibu, di halaman 14 dapat kami sampaikan bahwa sebagian di akhir program Simirah1 yang subsidi itu hampir semuanya sudah biru, yang berarti udah aman, udah terdistribusi dan sudah ada stok yang cukup di masyarakat.

Dan kalau kita lihat di halaman 15, ini juga harga sudah cukup konsisten sampai dengan 31 Mei itu di 15.978 ini sudah sangat mendekati harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Bapak/Ibu.

Setelah akhir daripada program minyak goreng subsidi tadi itu dilanjutkan dengan program minyak goreng curah rakyat, itu yang wajib untuk suplai dalam negeri atau DMO. Ini kami di Kementerian Perindustrian diminta untuk menyiapkan platform untuk pendaftaran produsen, baik itu CPO, minyak goreng dan menelusur pendistribusiannya sampai dengan konsumen atau masyarakat.

Ini setelah itu dikembangkan minyak goreng, sistem informasi minyak goreng rakyat. Progres pendaftaran di halaman 18 dapat kami laporkan, itu sampai dengan saat ini itu ada 194 perusahaan yang telah mendaftar. Jadi dari 194 perusahaan ini 101 adalah produsen CPO dan 93 produsen minyak goreng sawit. Dari 194 ini sudah diterbitkan nomor registrasi yaitu sebanyak 149 dan dari 149 yang telah terbit 71 merupakan produsen CPO dan 78 merupakan produsen minyak goreng sawit.

Jadi memang masih ada beberapa yang berproses yaitu terutama kalau di produsen minyak goreng sawit ini udah lengkap, ini sekarang yang masih berproses adalah yang di-CPO-nya untuk mendaftar. Kami dapat melaporkan bahwa untuk kebutuhan dan distribusi ini sudah ya sampai dengan akhir Agustus kemarin ini seluruh provinsi telah mendapatkan pasokan minyak goreng curah rakyat.

Dan memang ada beberapa yang tadi distribusinya masih belum merata dan ini sudah diperbaiki dengan memberikan indeks pengali untuk perusahaan industri bisa lebih mendistribusikan untuk daerah-daerah yang sulit dan masyarakat yang sedikit di daerah tersebut, jadi persebarannya yang tinggi.

Dan juga di halaman 20, ini juga dikeluarkan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022. Ini untuk memudahkan distribusinya dengan minyak goreng kemasan, minyak goreng kemasan, minyak goreng kita dan sampai dengan saat ini itu hampir 90.346,6 ton ini sudah didistribusikan, untuk terutamanya untuk daerah-daerah yang susah dijangkau.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Berikut adalah penyaluran, kalau kita lihat ini penyaluran-penyaluran baik itu untuk bulan Juni tanggal 1 sampai 30 Juni ini penyalurannya mulai setengah tahun ini sudah di atas kebutuhan yang ditetapkan yaitu sebesar 277.000 ton dengan DMO 232,6 ribu ton jadi ini udah di atas kebutuhan yang diharuskan yaitu sekitar 119,27%.

Demikian juga di bulan Juli ini udah 137,19% dan ini sepanjang hari di tahun 2020, bulan Juli 2022 ini di atas kebutuhan dan demikian juga di bulan Agustus ini udah di atas kebutuhan, serta kalau kita lihat rata-rata sampai dengan 13 September 2022 ini kami bisa sampaikan itu sudah 119,61% di atas kebutuhan dan harga di halaman 25. Ini harga sudah sangat mendekati harga eceran tertinggi atau rata-rata mencapai 15.678 per kg, harga eceran tertinggi 15.500 per kg.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VII DPR RI.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Interupsi sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Nasir.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Mungkin diteruskan sama Pak Dirjen, kita juga ingin minta keterangan Pak Dirjen masalah kasus Wilmar tentang minyak goreng.

Tolong anda jelaskan juga disini, seperti apa duduk perkara kasusnya karena kan anda tahu kenapa dia ditangkap oleh Kejaksaan, tolong dijelaskan. Mungkin Ketua Asosiasi juga bisa menanggapi, tolong dijelaskan di forum ini.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kami persilahkan Pak Dirjen, sebatas Pak Dirjen ketahui, pahami silakan, kalau nggak paham ya nggak bisa ini juga.

Silakan Pak Dirjen.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Yang kami pahami memang ada masalah ya karena ditangani oleh Kejaksaan Pak, tapi apa masalahnya itu kami masih dan itu masih dalam proses hukum.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Kan jelas di berita itu permasalahannya.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Iya Pak, tapi kami tidak begitu mendalami itu dan kita, kami mohon maaf, mohon izin Pak Nasir.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Kan Bapak ini kita kasih 2 jabatan, izin Pimpinan. Bapak ini Dirjen Agro dan dirjen yang ngurusin perusahaan-perusahaan saya lihat, harusnya kan tahu permasalahannya, nggak mungkin.

Kita aja tahu permasalahannya karena di berita jelas dijelaskan, makanya kita minta untuk rapat ini nanti Pimpinan kita minta komisaris utamanya dihadirkan, nah gitu, karena kan pasti komisaris utamanya pasti *owner*-nya supaya kita tahu duduk permasalahannya gitu. Mungkin bisa ditambahin Ketua Asosiasi apa permasalahan Wilmar ditangkap kejaksaan.

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, ini ada beberapa asosiasi Pak Nasir. Jadi sebenarnya kalau ini mungkin ke asosiasi dewan ya, Dewan Minyak Sawit Indonesia cuma nggak hadir ya, ya mungkin ini ya kami berikan kesempatan sekilas dulu karena habis ini langsung ke pendalaman Pak Nasir. Mungkin lebih enakya langsung ke pedalaman aja ya Pak ya biar nggak berulang-ulang.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Izin Pimpinan.

Kalau boleh saya menyarankan, kita berikan kesempatan tadi Pak Dirjen kan sudah menjelaskan ya dari sisi produksi, teknis. Lalu kemudian saya kira ada baiknya ditindaklanjuti dengan perusahaan-perusahaan yang lain untuk memberikan soal penjelasan-penjelasan yang terkait terhadap apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi.

Lalu kemudian setelah nanti mereka-mereka sudah selesai menjelaskan, memberikan pemaparan baru kita lanjutkan untuk pendalaman. Usulan saya Pak Bambang, lalu kemudian kalau saya bisa sarankan kepada kita semua, domain kita itu adalah domain yang terkait terhadap perindustrian dari sisi produksi dan sisi teknis. Di luar itu yang saya pahami saya kira ada teman-teman yang lain juga nanti yang mungkin melakukan pendalaman.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Nasir dan juga Pak Lamhot.

Untuk diketahui untuk seluruh Anggota Komisi VII bahwa pada hari ini agenda kita adalah pemenuhan kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat dan didalamnya adalah kita meminta penyampaian secara detail produksi serta penyaluran CPO dan minyak goreng, serta jangkauannya, luasan wilayahnya.

Jadi ini agenda kita ya untuk diketahui teman-teman, untuk itu tadi apa yang sudah dipaparkan Pak Dirjen, Pak Dirjen di sini ditemani dan juga oleh beberapa asosiasi dan juga para pelaku usaha yang mereka memproduksi minyak goreng untuk masyarakat.

Untuk itu mohon kita fokus kepada agenda kita adalah terkait pemenuhan dan distribusi, untuk itu karena paparan tadi Pak Dirjen sudah selesai. Kami persilahkan ini per fraksi kami berikan kesempatan yang pertama kepada Fraksi PDI Perjuangan.

Waktu dan tempat kami persilahkan.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Pimpinan, sebelum pendalaman kita apa, beri kita kasih kesempatan terhadap pelaku usaha ataupun asosiasinya selain Pak Dirjen.

KETUA RAPAT:

Pak Lamhot karena konsep ininya untuk mempersingkat waktu dan teman-teman dari industri tidak menyampaikan bahan pula. Jadi mereka siap didalami karena agenda kita itu Dirjen menghadirkan, jadi ibaratnya *supporting*, *supporting* dari seorang Dirjen. Jadi kami berikan kesempatan kepada Fraksi.

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Interupsi Pimpinan, Falah Amru.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Falah.

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Usul aja Pimpinan, sebaiknya Ketua Asosiasi memperkenalkan atau masing-masing memperkenalkan biar kita kenal semua di sini, yang hadir siapa, yang kenal cuma Pak Franky. Jadi dikenalin dulu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Falah mungkin tadi terlambat ya, tadi sudah saya absen jadi mohon maaf Pak Falah.

Kami persilakan Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kawan-kawan Komisi VII juga Pak Dirjen Industri Agro, Bapak-bapak yang mewakili dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit, dari PT Wilmar Pak Franky sehat Pak ya, makin muda, makin segar, makin ganteng Bapak ini, terus yang dari Smart, Musim Mas Group, Apical Permata Hijau, Inkasi Salim, BKP Group, KPM Gamma dan PT Wings Group, juga hadirin sekalian yang saya hormati.

Pak Dirjen Industri Argo tadi sudah menjelaskan kepada kita di sini, saya langsung interaktif ya Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Dipersilakan Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Ini disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa luas lahan kelapa sawit yang ada ini Pak yang tersebar di 26 provinsi itu sebanyak 16 juta koma sekian hektar, betul Pak ya? Betul.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Mohon izin, ini 16 juta Pak ya.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Berapa juta?

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

16 juta 380 **...(suara tidak jelas 45.38)**

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya 16 juta koma sekian lah 81 hektar ya, itu terdiri dari 2 komposisi punya perusahaan 58%, punya rakyat itu 42%. Jadi ada inti dengan plasma gitu Pak ya, ini riil Pak, datanya riil nggak ini? Betul riil ya.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Demikian Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Berarti 58% dari 16 juta yang punya perusahaan ya begitu Pak ya.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Iya Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Boleh disebutkan Pak berapa persen, berapa juta hektar dari 16 itu Pak, sekitar aja, sekitar.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Sebentar Pak.

Ini sekitar 9,45 juta hektar Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Totalnya 9.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Yang 58% ini.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya dari 16 juta 58% nya berapa Pak.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

9,45 juta sekitar Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

9,45 juta hektar, terbagi dari 10 grup ini Pak, diperkirakan aja terbagi dari 10 grup ini.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Ada 7, sebentar saya kali kan dulu Pak. Ada 7% itu karena yang di perkebunan perusahaan ini termasuk yang BUMN Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

BUMN, ada milik BUMN juga.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Iya Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Dari yang 9,45 hektar ini.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Iya Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Oke, nanti saya interaktif ya sama perusahaan-perusahaan yang hadir ya.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Silakan Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Terus ada statusnya Pak lahan 9,45 juta hektar ini? 9,48 juta hektar, ada Pak?

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Sebentar Pak saya carikan.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Pimpinan, sedikit bisa Pak Bambang.

Tadi kan Pimpinan mengatakan bahwa kita waktunya sangat terbatas ya, kalau saya boleh usul kita fokus dari sektor industrinya.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Lamhot, kita ini giliran PDIP.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Iya betul, maksud saya, saya mengusulkan tadi kan Pimpinan yang mengatakan bahwa kita punya keterbatasan waktu. Tadi kan saya minta, tadi kan Pak Nasir tadi kan saya minta semua industri juga bicara tapi Pimpinan mengatakan bahwa kita punya keterbatasan.

Maksud saya adalah sektor industrinya yang fokus kita dalam rangka pemenuhan hilirisasi yang berbasis sawit ini, kalau kita tanya nanti Pak Dirjen ini dari sektor perkebunannya saya nggak yakin beliau itu bisa memahami sektor perkebunannya gitu. Itu usulan saya, namanya juga usulan Pak Nasir, Pak Gunhar. Saya tidak menghalang-halangi Saudara saya Gunhar untuk bertanya lebih jauh.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Siap, terima kasih Bang lamhot asal-usulnya tapi ini kan untuk melengkapi data seperti yang disampaikan oleh Bro Nasir. Kita untuk mendapatkan informasi yang akurat nanti ketemu nih jumlah, segala macamnya itu ketemu tapi kita harus datanya lengkap dulu tanpa mereka menyampaikan data secara lengkap.

Ini sebetulnya sudah baik datanya, udah ada tetapi untuk lebih detailnya kan belum dikasih ke kita iya kan. Setelah ini mungkin kita perlu kunjungan untuk melihat apa betul apa yang disampaikan pada ruangan ini kalau tidak cek ke lapangan, nggak *clear*, begitu Pimpinan.

Boleh Pak, udah dapat datanya? Masih dicari, oke mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen, saya tengahin.

Intinya yang anda pahami dan anda memang Tupoksinya kan, selama apa pertanyaan yang berkaitan dengan agenda tadi yaitu pemenuhan. Jadi terkait lahan setahu Bapak aja, kalau memang itu ranahnya tadi yang disampaikan Pak ini tinggal disampaikan, lahan ini kami tidak mengetahui secara detail, ini adanya di kementerian ini, silakan nggak apa-apa, daripada kita disuruh nunggu sedang Bapak sendiri tidak mengetahui data detailnya.

Silakan dilanjut.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Terima kasih Pimpinan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Interupsi Pimpinan, sedikit meluruskan aja.

Karena disinikan paparan Pak Dirjen sudah menyebut lahan 16 juta kan ada Pak Dirjen. Makanya nanti itu kan Pak Gunhar nanya 16 juta dibagi 58% berapa per perusahaan kan pasti ada catatannya. Ini kan ada ini, Bapak buat 16 juta, ini perusahaannya kan hadir nih. Itu maksudnya tadi, izin Pimpinan di halaman 4 Pimpinan.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Maksudnya begini loh Pak Dirjen, ini kan yang tersurat yang tidak tersurat kan beda lagi karena kita ada mengunjungi suatu perusahaan perkebunan, itu yang terdaftar HGU-nya sekian hektar tetapi dalam pelaksanaan operasi produksinya itu melebihi dari lahan yang ada.

Ini kan akan jadi catatan Pak Dirjen, jadi yang saya tanyakan ini sebetulnya bisa Pimpinan dijawab oleh masing-masing perusahaan yang hadir disini. Dialihkan saja Pak Dirjen kalau memang itu, Pimpinan dialihkan kepada masing-masing perusahaan ini berapa hektar masing-masing mereka ini punya HGU, nggak perlu repot Pak Dirjen hitung pakai kalkulator.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen, sebenarnya ini pendalaman terkait apa yang disampaikan di dalam bahan tadi karena saya pikir tidak ada, begitu disampaikan Pak Nasir ternyata memang di halaman 4 Pak Dirjen menyampaikan, luas lahan kelapa sawit sebesar 16,3 sekian juta hektar dengan 26 provinsi penghasil.

Yang dimaksud dari pendalaman itu terkait ini, maksudnya datanya itu Pak Dirjen dari mana itu kan 26 juta, 16 juta ini. Kalaupun tersebar di 10 perusahaan ya tinggal disampaikan aja ya.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Atau kalau Pak Dirjen, izin Pimpinan, tidak mempunyai data itu tanya langsung aja Pimpinan, ke masing-masing perusahaan ini, kamu berapa hektar, berapa hektar gitu loh. Udah terkumpul nanti kita baru kalkulasi lagi dari 16 juta koma sekian ini yang kata Pak Dirjen punya perusahaan itu hanya 58%. Kita kroscek betul nggak 58%, di situ kalau dia 58% berarti ada biaya yang dibayarkan oleh perusahaan terhadap lahan, begitu.

Boleh dikasih waktu lah, coba dikasih catatan perusahaan-perusahaan yang hadir ini. Masing-masing perusahaan, 10 perusahaan yang hadir ini berapa sih luasnya lahan sawit mereka ini Pak Dirjen.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Baik, terima kasih Pak Gunhar, Pimpinan.

Mohon izin, memang kalau datanya ini, ini data kita dapatkan dari Kementerian Pertanian. Memang secara makro Pak, secara makro kita dapatkan ya nanti kalau diizinkan kami mohon kepada Gapki, jadi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit untuk membantu kami untuk memberikan tambahan penjelasan.

Terima kasih Pimpinan, terima kasih Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Ini tambahan Pimpinan, kalau tidak salah pada laporan BPK akhir tahun 2021 kemarin disampaikan dalam forum Rapat Paripurna. Ada kurang lebih 2 juta 780 ribu sekian hektar lahan yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak taat pada aturan regulasi yang ada.

Artinya lahan 2 juta 700 ribu sekian hektar ini menjadi lahan produksi tetapi tidak memenuhi kewajiban apa yang sesuai dengan peraturan perundangannya.

Ini laporan BPK loh Pak, ini kalau kita persoalan data saja kita masih belum *clear*, belum konkret. Ini gimana kita bisa menghitung pajak, PNPB gitu loh ya kan, di satu sisi kita mungkin bisa menyerap tenaga kerja dan lain-lain, tetapi di sisi lain pendapatan negara dari sektor pajak maupun PNPB-nya tidak terpenuhi juga.

Dan status lahan sekian juta ini Pak, katakanlah ini kalau menurut Bapak tadi 9,45 juta hektar ini, ini status kepemilikan lahan HGU atau hak milik gitu loh. Kalau di sektor pertambangan mereka hanya HGU ya kalau nggak salah ya di sektor pertambangan yang 60.000 per hektar itu kan, hak guna usaha.

Ini kita nggak jelas status lahan ini, apakah hak milik, kalau hak milik jelas dong berapa ribu hektar setiap masing-masing perusahaan gitu loh dan berapa pajak yang dihasilkan dari kepemilikan lahan produksi perusahaan ini.

Kita mau transaksi aja Pak di notaris kalau kita mau beli rumah, mau beli tanah itu kena pajak iya kan dan tiap tahun pun kita kena pajak juga, PBB kalau nggak salah namanya pajak bumi bangunan. Ini kalau kebun ini apa namanya pajak apa ini, jadi bisa kita kalkulasi kita hitung secara detail, tapi kalau Pak Dirjen tidak punya lahan ini, tidak punya data yang detail begini.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, saya sarankan Pak Gunhar langsung interaktif aja salah satu pengusaha-pengusahanya Pak, supaya langsung dijawab Pak. Yang ditanya Pak Gunhar itu sangat penting.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya, yang punya tugas mengumpulkan perusahaan ini Pak Dirjen iya kan, kalau perusahaan ini nggak ada urusannya sama kita. Mitra kita ini Pak Dirjen, Pak Ramson, kalau saya langsung tanya interaktif di sini mereka saya yakin nggak faham ini Bapak/Bapak ini.

Bapak ada yang paham di sini punya berapa luas lahannya, tunjuk tangan aja, saya tanya satu-satu kalau ada yang paham, ada yang paham Bapak? Pada diem semua, nanti dia ngomong sekian hektar nggak jelas, kita hitung semua dapat angka.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi lagi Pak Ketua, Pak Gunhar ngomong tidak mitra-mitra kita, RDPU siapapun yang diperlukan dalam fungsi pengawasan ditanyakan data bisa Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Oke, kita lanjut kalau begitu dari ujung berapa hektar *sampeyan* punya lahan, bisa dijelaskan.

PT WINGS GROUP:

Kami dari Wings Grup kita ada sekitar 60 ribu hektar Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

60.000 lanjut.

PT SMART:

Kami dari Smart 105.000 Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

105.000 ya, lanjut Pak.

PT WILMAR:

Mohon maaf saya dari Wilmar Pak, kebetulan di Wilmar ini kita ada perusahaan yang berbeda-beda dengan PIC yang berbeda. Jadi untuk kebun itu ada divisi kebun sendiri yang bisa menjelaskan, saya takut salah Pak.

Terima kasih Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Belum ada data ya.

PT WILMAR:

Saya kebetulan sebagai Presiden Direktur di perusahaan distribusinya Wilmar Pak, untuk minyak goreng.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Oke, catatan ya catatan Pak Dirjen ya.
Terus lanjut.

ASOSIASI:

Kami dari asosiasi Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Asosiasi, lanjut lagi.

PT MUSIMAS GRUP:

Izin Pak saya dari Musimas Group luas lahan lebih kurang 120.000 hektar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

120.000, terus Pak.

FRANKY SALIM GRUP:

Kami luas lahan 250.000.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

250.000, Om Franky.

Lanjut Pak, iya dong Om Franky kan sangat populer, berapa Pak.

PT GAMA:

Kita dari Gama lebih kurang 100 Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

100 ya, jadi yang belum ini BKP, Incasi ya Pak sama Wilmar. Coba Bapak hitung cukup nggak 9,45 juta hektar, iya sisanya kita hitung aja yang belum, ditambahin aja Pak semuanya, 105.000 ditambah 120.000, ditambah 250.000 ditambah 100.000 ditambah 60.000, belum satu juta.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen, ini yang kita undang adalah 10 besar perusahaan kan, total perusahaan CPO ada berapa Pak, mungkin bisa dijelaskan gitu, total yang ada di Indonesia jadi biar nggak salah hitung. Kalau ini hanya 10 ya mungkin 1 jutaan lah ya, kalau di luar ini ada berapa Pak.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Mohon izin Pak Ketua, jadi yang kita undang hari ini adalah perusahaan industri minyak goreng sawit Pak, jadi minyak goreng nabati. Kalau untuk yang minyak goreng minyak, industri goreng sawit ini, ini ada 104 pabrik Pak, ada di 79 perusahaan industri.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya Pimpinan, saya ini hanya mengulas data Pak Dirjen iya kan, mau dia jumlah perusahaannya 200, 300 inikan dasar dari Bapak ini, 16,381.959 juta hektar jumlah luas lahan kelapa sawit begitu ya, betul ya.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Pak Gunhar mohon izin, kami ini ambil dari SK Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit itu jumlahnya demikian.

Terima kasih.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya nggak apa-apa, saya cuma tanya iya nggak itu Pak, betul kan tersebar di 26 provinsi. Ini kan tulisan Bapak, betul.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Demikian Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Punya perusahaan 58%, punya masyarakat 42% setelah kita bagi 9,45 juta hektar kan begitu iya kan. Dari 10 perusahaan ini setelah kita hitung, keterangannya kita ambil dari masing-masing perusahaan ini kan belum sampe 1 juta iya kan. Kalau kita sebar lagi ada 200 perusahaan yang punya izin, punya lahan itu kurang lebih 8 juta. Jadi 1 juta ini cuman hanya dikuasai oleh 10 perusahaan besar ini Pak, katakanlah 1 juta, nggak mungkin Pak, nggak mungkin.

Kalau itu dikuasai oleh masyarakat bukan dari 10 perusahaan besar ini, harga minyak goreng itu pasti bisa turun, pasti bisa dikendalikan oleh pemerintah karena ini menyangkut harga pasar. Kenapa harga minyak goreng lebih tinggi di tanah air ini? karena nilai jual ekspornya juga lebih tinggi.

Jadi petani itu dirugikan dari harga yang sudah dipatok pemerintah pun tidak terpenuhi Pak, jumlah kebutuhan dalam negeri untuk minyak goreng ini juga nggak terpenuhi. Ini dari hulunya kita ini udah nggak jelas datanya, bagaimana kita akan mengelola ke hilirnya.

Kalau hanya dikuasai oleh 10 besar perusahaan ini ya monggo, perusahaan-perusahaan ini nasionalismenya dong, kalian udah dapet lahan di tanah Indonesia ini, udah bikin usaha di tanah Indonesia ini, masa kebutuhan masyarakat pun yang sangat krusial minyak goreng ini nggak bisa anda kasih *spare* lah dikit. Ikutin aja pemerintah, udah pernah kan dilarang ekspor, larangan ekspor ada harganya makin ancur, harga di luar makin tinggi, seperti itu.

Jadi Pak Dirjen data Bapak ini enggak lengkap menurut saya dan perusahaan-perusahaan ini pun tidak memberikan data yang akurat, belum kita bicara jumlah produksi Pak, di angka Bapak ini ada jumlah produksinya iya kan. Kebutuhan dalam negeri berapa, kebutuhan untuk ekspor berapa.

Kalau kita kalkulasi lagi jumlah masing-masing produksi perusahaan ini Pak atau kita datangkan tim untuk mengaudit, menginvestigasi ini panjang lagi ceritanya Pak, urusan minyak goreng aja kita enggak becus ngurusnya, gimana urusan-urusan yang lebih besar.

Jadi Pimpinan, menurut saya Pimpinan ini mungkin harus dibentuk Panja Pimpinan. Kita harus melakukan pendalaman terhadap persoalan ini, kita tidak boleh melakukan pembiaran, ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kita sebagai fungsi pengawasan harus begitu detail urusan begini, kalau kita melakukan pembiaran ini bukan tidak mungkin harga minyak goreng itu ya tergantung dengan keinginan dari perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan ini.

Sekian dulu dari saya Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Dirjen intinya yang dapat kita tangkap adalah pesan Pak Gunhar perlu kejelasan data, mungkin ya Pak Dirjen bisa minta kepada Kementerian Pertanian karena sebenarnya agenda hari ini adalah lebih kepada berapa sih distribusi yang ini dan harga ketercukupan di, harga ketercukupan minyak goreng di masyarakat bagaimana.

Itu yang harus lebih ditekankan kenapa kita minta jangkauan juga dari 10 perusahaan ini, apakah sudah dan berapa harga per hari ini.

Tadi disampaikan Pak Dirjen kalau enggak salah katanya 15.000 ya, sudah bagus. Mudah-mudahan bisa ditekan karena potensi saat ini disparitas energi ini cukup tinggi Pak apalagi adanya perang Ukraina ini.

Salah satu bahan dari ini, kelapa sawit ini bisa untuk bahan baku biodiesel, kalau enggak salah namanya Fame kan. Dengan kondisi *crude* yang sangat tinggi Fame ini menjadi salah satu opsi energi baru terbarukan yang lagi digagas oleh pemerintah Republik Indonesia.

Jadi saya pikir tidak hanya perusahaan-perusahaan kelapa sawit, tidak hanya berfokus terhadap minyak goreng saja tapi bisa membantu terhadap pemenuhan BBM untuk kebutuhan nasional khususnya, jadi itu ya.

Kepada teman-teman sekalian, saya lanjutkan kepada Fraksi Partai Golkar, ini mana fraksi perindustrian ini Fraksi Partai Golkar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan sebentar.

Mungkin dari Fraksi PDI Perjuangan Ibu Mercy akan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya saya berikan Golkar nggak ada, kepada Fraksi Partai Gerindra.

Pak Ramson.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua Rapat, Rekan-rekan Anggota yang terhormat.

Pak Dirjen dan Dirut-dirut dan Pimpinan perusahaan-perusahaan CPO atau minyak goreng yang saya hormati.

Ini orang-orang besar semua, hanya karena tadi udah banyak ditanyakan oleh Pak Gunhar. Yang saya mau tanyakan Pak Dirjen, ini bisa dijawab oleh Pak Dirjen, bisa dijawab oleh Dirut-dirut secara interaktif. Sekitar Januari ke bulan Juni kemarin sekitar 6 bulan, kita langka minyak goreng. Waktu itu saya memang diwawancarai oleh Kompas, Perindustrian belum mitra Komisi VII.

Artinya kenapa langka minyak goreng, padahal saat itu yang saya ketahui 48 juta ton produksi CPO tapi data sekarang saya 52 juta ton. Dari komposisi itu memang ada untuk dalam negeri 8 juta metrik ton untuk biodiesel, 8 juta metrik ton untuk pangan dalam negeri, di sini datanya 8,3 sekarang, lapangan itu termasuk minyak goreng.

Sekarang dibuat perinciannya minyak goreng curah, goreng kemasan tapi kalau pada saat itu 8 juta ton untuk dalam negeri untuk pangan. Tapi kenapa bisa langka? Karena untuk yang di ekspor masih banyak, jadi yang dalam negeri hanya 16 juta ton.

Ini yang perlu dijelaskan dulu baik oleh Pak Dirjen maupun mungkin mewakili 3 Dirut Wilmar 1, Dirut Salim Group, yang hadir Dirut mana lagi yang kuat, Smart satu, Wings sih kuat tapi nanti belakangan aja, semua katanya kuat.

Artinya tolong dijelaskan ini karena ini penting, karena kelangkaan minyak goreng itu, itu membuat rakyat menderita dan juga kadang-kadang pejabat publik jadi salah bicara.

Padahal kita udah terbiasa dengan minyak goreng, padahal karena harga CPO di pasar global naik, tapi rakyat kita yang menderita ini kan jadi salah, padahal udah ada jatah ekspor, ada jatah dalam negeri. Jatah dalam negeri hanya 16 juta metrik ton, kalau waktu itu data yang saya peroleh 48 juta, kalau ini malah 52 juta metrik ton CPO produksinya.

Ini persoalannya kenapa bisa terjadi seperti itu karena kita kan, apalagi DPR RI kan harus menjaga kepentingan rakyat banyak. Disitulah fungsi pengawasan yang diamanatkan konstitusi kepada DPR RI, selain fungsi legislasi membuat undang-undang kalau di Amerika Kongres namanya *law maker* sebenarnya DPR RI ini.

Cuma kadang-kadang belakangan ini agak turun sedikit marwahnya, sebenarnya kuat DPR RI itu, *law maker*. Kalau di Kongres Amerika kalau dia keluar di kawal sama *special service* itu kalau kunjungan ke luar negeri, kalau kita di sini dilepas aja, itu aja udah banyak ribut lagi.

Kalau di sana begitu Pak karena saya udah 5 kali dialog-dialog di Kongres, saya sejak Oktober 1999 di DPR RI, 10 tahun pertama saya bolak-balik dialog di Kongres, debat, mungkin 7 kali.

Jadi mereka terhormat sekali, jadi karena apa? terkait pembuatan hukum, *law maker*, membuat undang-undang. Itu kalau dibuat undang-undang berarti semua warga negara wajib melaksanakannya, baru fungsi anggaran, anggaran APBN itu.

Ini sekarang dari fungsi pengawasan, tolong tadi dijelaskan karena sangat penting. Artinya supaya nanti tidak terjadi lagi Pak Dirjen, ini bisa interaktif atau gimana Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ramson.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Tolong Pak Dirjen dulu, baru nanti yang 3 Dirut itu.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Baik, mohon izin Pimpinan.
Terima kasih Pak Ramson.

Jadi memang ada kelangkaan minyak goreng terutama di awal tahun 2022 Pak, di pacu utamanya oleh tingginya harga bahan bakunya Pak. Jadi CPO pernah mengalami sampai dengan 1.700 per metrik ton, sehingga yang biasanya dibawah 600 US Dollar per metrik tonnya. ini jadi peningkatan yang luar biasa. Itu sebenarnya salah satu faktor yang memicu ya kenapa minyak goreng pada saat itu, minyak goreng pada saat itu jadi mahal.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, ini Pak Dirjen ini sangat baik cuma itu saya udah tahu Pak. Artinya kan *raw material* dari minyak goreng semua diproduksi dalam negeri, tenaga kerjanya semua tenaga kerja dalam negeri tidak ada yang impor.

Artinya bahwa *cost of product*-nya tetap sama, naik atau turun harga di pasar global, kalau harga *cost of product*-nya dalam negeri tetap sama Pak, paling kalau ada tenaga-tenaga ahli yang diimpor mungkin baru beda, kan semua dari dalam negeri, mau minyaknya, mungkin minyak ada di impor, minyak BBM nya mungkin untuk pabrik.

Jadi ini kalau ini jangan menyesuaikan dengan harga global sehingga di ekspor semua baru ada DPO-nya, *domestic price obligation, domestic market obligation* itu kenapa bisa terjadi Pak. Jadi maksudnya jangan soal karena harga di pasar global, justru itu harus di *protect* karena itu produksi dalam negeri kan sangat banyak kan harus melindungi kepentingan rakyat Indonesia.

Silakan Pak Dirjen kalau ini nanti bisa ke-3 Dirut tadi Pak.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Terima kasih Pak Ramson.

Saya lanjutkan karena didalam produksi, memang biaya produksi tidak berubah Pak. Jadi karena bahan baku sebagian besar itu *cost* strukturnya itu bahan baku Pak. Bahan baku ini bahan baku menjadi, yang menjadi memang kita waktu itu tidak bisa, tidak terpengaruh oleh **...(suara tidak jelas 1:17:56)** itu yang menjadikan dia karena bahan bakunya meningkat, ini jadi harganya.

Disamping itu disisi lain yang dikeluarkan DMO-nya waktu itu Pak, DMO dan DPO yang Bapak sampaikan untuk wajib pasok dalam negeri dengan harga **...(suara tidak jelas 1:18:21)** waktu itu memang karena mekanismenya waktu itu ada hal-hal yang belum berjalan lancar Pak, nah itu juga berpengaruh terhadap keberadaan minyak goreng tadi.

Sehingga waktu tanggal 15 Maret dicoba pendekatannya dari sisi industrinya Pak, kami Perindustrian waktu itu ditugaskan dan itu memang sudah mampu ya sampai dengan 31 Mei sudah mampu untuk mendistribusikan dan keberadaan minyak goreng di masyarakat itu udah cukup bagus dan.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Dirjen, kalau gitu beralih ke Dirut Wilmar dulu Pak, mohon maaf. Kenapa bisa terjadi 5 bulan lebih langka itu, harganya sangat tinggi.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Mohon dibantu Pak.

DIRUT PT WILMAR:

Mohon izin Pak Ketua, Pak Dirjen saya coba menjawab.

Pak Ramson, selamat siang Pak.

Kebetulan kalau kita bicara masalah distribusi dan kelangkaan minyak goreng saya selama ini cukup banyak terlibat Pak, juga kita banyak melakukan evaluasi dan lain-lain Pak terhadap problem-problem.

Kelangkaan minyak goreng itu hanya terjadi sampai di pasar ya Pak, sampai kurang lebih hanya akhir Maret saja Pak. Begitu ketentuan kebijakan yang DMO-DPO dicabut tanggal 16 Maret kalau nggak salah, itu di pasar sudah mulai banjir Pak.

Jadi sampai dengan 30 Maret kami monitor di pasar itu barang sudah ada dimana-mana, bahkan sampai hari ini dengan program yang sekarang ini ditangani oleh Pak Dirjen di Kemenperin kita ini barangnya sekarang sudah *full* di mana-mana, bahkan kami Pak kesulitan untuk menjual sekarang, di tangki-tangki kita ini banyak penuh hari ini, kenapa begitu?

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, jadi Pak Dirut PT Wilmar sampai Mei masih langka. Tahu enggak kenapa sekarang menjadi banjir, harga CPO di pasar global udah turun. Jadi maksud saya kalau harga CPO di pasar global tinggi tetap kepentingan rakyat banyak harus diproteksi, sekarang udah turun, udah 700 dolar, waktu itu emang 1.500 dolar, 1.600 itu maksud saya di situ.

Artinya bahwa kan udah ada jatah DMO itu kan dulu ada 8 juta metrik ton untuk pangan dalam negeri, CPO memang 8 juta metrik ton karena saya ingat sewaktu harga CPO di pasar global anjlok, ini Bapak/Bapak ini memintaminta agar masuk menjadi biodiesel, makanya timbul B20, sekarang B30, akhirnya dibeli oleh Pertamina. Saya tanya Pertamina, ini gimana lobi-lobi melulu ya. Saya bilang sam pejabat Pertamina, supaya dibeli CPO, apalagi waktu harga rendah, makanya itu harus *fair*.

Maksud saya, saya bicara soal kepentingan rakyat. Waktu itu kan jadi dibeli, kalau waktu itu tidak ada biodiesel kan *over supply* ini karena lagi jatuh harganya, waktu itu harga CPO di pasar global. Jadi maksud saya kalau harganya di pasar global lagi tinggi, jangan pula rakyat dilupakan, jangan semua untuk ambil untung padahal udah ada jatahnya untuk pangan dalam negeri 8 juta metrik ton, itu tidak terpenuhi makanya langka.

Saya ngomong waktu itu debat juga sama stafnya dari Sekneg itu, saya bilang jangan asal ini aja, termasuk debat di Kompas, riilnya aja saya tau datanya kok 8 juta metrik ton itu nggak bisa direalisasikan makanya langka. Kalau itu direalisasikan tidak langka, sekarang udah turun harganya 700 dolar ya pasti banjir.

Jadi itu Pak, maksud saya berikutnya ini Dirut-dirut kan ini di pasar global itu kan bergelombang nih harga, termasuk bagaimana sekarang udah dibuka kan Ukraina, semua udah dibuka, udah agak baik.

Makanya harga *energy security* sekarang ini sekarang Eropa yang babak belur karena masih dikunci gas sama Rusia, tapi pangan udah agak jalan ini. Jadi maksud saya kalau ada terjadi gitu di-*protect* didalam negeri.

Terima kasih Pak Dirut Wilmar, coba Om Franky ya saya dengar dulu penjelasannya ini.

PT SALIM GRUP (FRANKY):

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ramson, Bapak Nasir.

Bapak/Ibu Komisi VII.

Terima kasih, saya kira saya coba beberapa hal mungkin dari pembicaraan awal. Yang hadir di sini adalah industri *refinery*, jadi kami ini terbagi atas 2 Pak, perkebunan sampai hasil proses CPO itu ada dibawah Kementerian Pertanian.

Jadi yang soal harga CPO itu tersendiri, jadi kebetulan di sini Pak Dirjen Agro adalah industri, CPO itu bukan bagiannya jadi tidak mengikuti. Sehingga waktu ditanyakan luas dan lain sebagainya basisnya referensi, demikian Pak.

Khusus kalau ditanyakan kepada kami Pak Ramson, kami tidak ekspor, kalau di kami, kami tidak ekspor sama sekali. Kami menghasilkan minyak goreng, proses satu untuk industri, yang kedua untuk yang bermerk. Jadi kami juga tidak menghasilkan dulu awalnya dan tidak menjual minyak goreng curah.

Jadi itu satu sisi, hal kalau ditanyakan waktu kemarin dulu itu langka karena memang harga CPO tinggi, membeli CPO, petani senang Pak, petani senang harga tinggi, harga CPO tinggi karena internasional.

Jadi harga CPO di Indonesia mengikuti harga internasional dan itu dikontrol dengan satu mekanisme, ada pungutan-pungutan pajak termasuk **...(suara tidak jelas 1:25:44)** itu satu sisi.

Apa yang menyebabkan langka? Pada saat ditetapkan minyak murah pada saat itu 10.000 semuanya rugi. Itu yang akibatnya semuanya nggak bisa menjual hasil karena tidak ada satu masa transisi, hanya langsung *cut off* kalau jual di atas 10.000, 12.000, 14.000 ditangkep.

Polisi keliling semuanya juga tangkap-tangkepin retail yang menjual karena ada yang dalam distribusi dan sudah dijual kan harganya masih tinggi, besok langsung harus jual 14.000, itu yang terjadi Pak.

Akibatnya itu kelihatannya langka, jadi itulah yang dalam proses perjalanan beberapa keputusan dan proses, akhirnya ada proses yang berjalan dan diikuti dan dikontrol, itu melalui, dulu ada melalui mekanisme ekspor dan ini, dan itu tidak berjalan mungkin itu di ketahui sejarahnya.

Terus langsung dikembangkan dengan produk Simirah dari Kementerian Perindustrian, dari Kementerian Perindustrian semua kami harus bisa menjalankan dan itu semuanya baru menjalankan hal itu karena itu baru jelas dan tegas.

Kami, kami sendiri yang tadinya tidak menjual curah, mau tidak mau juga akhirnya kami akan, kami menjalankan penjualan curah harga 14.000 dan mulai mendistribusikan, tadinya nggak pernah distribusi. Saya kira itu dan itu diatur oleh Kementerian Perindustrian dan itu berjalan, terus masih di *upgrade* dengan program dari Perindustrian dengan Simirah kedua. Itu lebih *tracking* lagi, akhirnya terus harga menjadi merata secara nasional 14.000.

Saya kira itu yang tadi yang terakhir sampai akhirnya melampaui. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Pak Ramson, penjelasannya demikian dan itu semua industri minyak goreng tanpa kecuali. Artinya kami ini hanya sebagian, yang istilahnya populer karena *brand*-nya populer, ada *brand* Sania, Bimoli, ada macam-macam. Jadi itu yang *branding*, yang curah itu juga banyak. Jadi kurang lebih itu mungkin sebagai penjelasan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Ramson, cukup?

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI :

Interupsi Pimpinan.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Yang belum tadi Dirut Smart, soalnya udah nunggu-nunggu beliau jatahnya. Artinya argumentasi di parlemen, ibarat di kongres kan nggak apa-apa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Dirut.

DIRUT PT SMART:

Izin Pak Pimpinan, sama Pak Ramson.

Jadi saya hanya ingin menambahkan saja, saya kira harus diakui saya kira apa yang terjadi setengah tahun 2022 ini kita mau belajar lah ya, mencari kebijaksanaan publik yang pas untuk mengutamakan kepentingan masyarakat kecil, affordable minyak goreng.

Tapi saya ingin yakinkan bahwa dari kami seperti tadi Pak Franky juga sudah sampaikan, kita ini adalah *refinery*. Dari kami, kami punya 4 *refinery* Pak, 2 di Jawa, 1 di Jawa Timur, 1 disini Jakarta Marunda, eh 1 di Sumatera, 1 di Kalimantan. *Set up*-nya sudah dibentuk Pak, 2 yang di Jawa itu 90% dari dulu-dulunya pun selalu diutamakan untuk pasar domestik Pak, sedangkan 2 yang di Sumatera dan Kalimantan itu memang ditujukan untuk pasar ekspor. Itu tidak berubah Pak, jadi selama kita inipun kita terus menyalurkan untuk pasar domestic.

Memang saya kira tadi ada beberapa **...(suara tidak jelas 1:30:56)** kenapa terjadi kekosongan, saya kira memang itu bisa debatnya panjang sekali, mungkin.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, mau saya tanya.
Apakah waktu itu kurang suplai CPO ke *refinery*.

DIRUT PT SMART:

Nggak Pak.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Harga dinaikkan segunung?

DIRUT PT SMART:

Jadi kita waktu itu yang domestik pun kita mengikuti DMO dan DPO yang ditetapkan oleh pemerintah dengan berbagai jenis *policy*-nya pun yang berubah, kita ikut terus Pak. Sepanjang tahun ini, sepanjang 6 bulan pertama itu kita menyalurkan sekitar 300.000 ton. Jadi *set up* kita tidak berubah seperti itu Pak, sekarang pun seperti itu. Jadi yang di Jawa untuk domestik, yang di luar kita ekspor. Ketika kita ekspor pun ya memang kita tidak bisa ekspor gitu.

Saya kira itu Pak yang ini, jadi saya kira apa yang sudah kita, sekarang mulai lebih baik ya dengan program Simira. Saya kira kita sudah mulai ketemu pola yang lebih pas lah dan saya kira itu yang harus kita fokuskan ke depannya gimana, kita meng-*improve* lagi progam Simira ini supaya kepentingan nasional untuk mengekspor devisa juga terbentuk, tapi juga proteksi masyarakat supaya bisa mendapatkan minyak goreng yang terjangkau itu bisa tercapai juga, saya kira itu Pak.

Terima kasih.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Baik, terima kasih Pak.

3 Dirut karena poin saya sangat memalukan kita produsen CPO terbesar di dunia, tapi bisa langka minyak goreng Pak. Saya sebagai anggota parlemen saya sedih waktu itu. Ini di persoalan kebijakan sama operasionalnya.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Ramson.

Selanjutnya Partai Nasdem, nggak. Lanjut ke Demokrat.

Silakan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi, Anggota Komisi VII.
Pak Dirjen, seluruh perusahaan-perusahaan pengelola CPO dan minyak goreng.

Mungkin gini Pak Dirjen, ini kalau nggak ada masalah nggak mungkin hari ini kita panggil ke sini dan nggak mungkin pihak kejaksaan itu untuk menangkap salah satu perusahaan kan gitu Pak Dirjen. Mungkin dari Kementerian diminta keterangan, nggak ya, mungkin Kementerian Perdagangan ya, ini sampai menterinya dicopot iya kan karena memang prosesnya seperti itu.

Saya izin Pimpinan interaktif, saya mau tanya dengan Ketua, coba interaktif Pak, Bapak kan sebagai Ketua.

SEKJEN GAPKI GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT:

Saya Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Tadi kan datanya pasti ada di Beliau karena Beliau pengusaha kelapa sawit, bukan pengusaha minyak goreng. Saya mau tanya Pak, bener nggak yang disampaikan perusahaan-perusahaan ini tadi luasan lahannya. Bapak ada datanya?

SEKJEN GAPKI GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT

Kami tidak membawa satu persatu memang, tetapi secara global.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Ya nggak, maksud saya di Bapak ada datanya ya.

SEKJEN GAPKI GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT

Untuk anggota ada Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Benar nggak yang tadi disampaikan, contohnya Sinarmas, Smart inikan banyak nih perusahaannya dan anak-anak perusahaannya tapi digabung dalam PT Smart ya Pak. Bener nggak mereka memiliki lahan 120.000 hektar.

SEKJEN GAPKI GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT

Yang kami tahu benar Pak, benar seperti itu. Jadi artinya gini Pak, kami jelaskan dulu Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Forum ini didengar dengan seluruh rakyat Indonesia dan kita minta Pimpinan, nanti ini saya sepakat dengan Pak Gunhar tadi kita bentuk Panja dan kita minta gabungan nanti Komisi IV digabung disini, Komisi III digabung supaya ini terbuka transparan, bila perlu Komisi XI untuk masalah pajaknya ya.

Pak PT Smart ini paling besar di daerah saya, mungkin kedua Kalimantan kali. Mungkin sama juga PT Salim ini saya pernah Pak datang ke lokasinya, saya tanya ini lokasi Bapak? di peta nggak ada, tapi tanemannya punya PT Salim, di izin nggak ada, tapi tanemannya punya PT Salim. Jawaban PT Salim itu gampang, maaf Pak salah tanem ini.

Cuma jawabannya singkat, salah tanem, itulah jawaban PT Salim ke kami, waktu itu saya Ketua Panjanya. Tapi saya bingung ini kok nggak diproses-proses dengan proses hukum, saya minta transparan 250.000 itu Pak perhari CPO-nya kalau dia *rendemen* nya 20 saja, udah berapa ton itu coba Bapak, udah 500.000 Pak redemennya, kemana CPO-nya?

Hari ini Pak sebenarnya minyak goreng 3.000 perak, 5.000 perak udah bisa kalau ingin membuat kesejahteraan buat masyarakat kita karena CPO kita ini banyak, yang tidak melaporkan. Jadi saya nggak ngerti gitu loh, di sini nggak ada yang terbuka gitu, minyak goreng kita langka, sekarang banjir tapi masyarakat masih susah minyak goreng, mahal, ada apa gitu loh.

Tadi Pak Dirjen bilang nggak ada datanya, kan bohong juga Pak Dirjen. Anda itu pasti memeriksa satu perusahaan anda tanya dulu luasan kebunnya, sama produksinya. Dari mana Bapak dapat produksi minyak gorengnya kalau nggak dari awal anda tanya, kan aneh gitu loh. Belum lagi mereka sekarang menjual Fame, mohon maaf mungkin interaktif Pimpinan. Salim berapa Pak, jual Fame? Nggak ada, kenapa Bapak nggak jual Fame?

PT SALIM GRUP (FRANKY):

Kan tidak *define* ke sana, jadi itu kimia.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Jadi Bapak tidak ikut program pemerintah.

PT SALIM GRUP (FRANKY):

Tidak ikut memang.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Bandel ini Salim.

PT SALIM GRUP (FRANKY):

Bukan, itu khusus.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Salim ini memang tukang tipu-tipu, dia punya lahan 5.000. Saya datang ke lahannya, saya jalan ke lahannya itu aja sudah hampir setengah, 1 jam itu baru tengah-tengah lahannya, lahannya 5.000. Kita dikit-dikit punya lahan di Riau, tahu berapa luas lahan 5.000 itu, setelah kita cek lahannya itu 25.000 yang di Sungai Akar. Bapak jujur aja jadi di sini terbuka semua nanti, ini bener didengar semua masyarakat.

Saya minta pihak aparat datengin ini perusahaan, biar *clear*, semua saya kenal ini perusahaannya. Jadi jangan bohong-bohong Pak, kita disini menyelesaikan masalah, bukan nambah buat masalah. Bapak presiden mungkin diiming-imingin kanan-kirinya buat B30, disuruh beli Fame-nya perusahaan ini. Sementara Pertamina bilang ini *cost*-nya tambah besar, ini biayanya tambah besar bukan memperingan negara.

Saya minta pembelian Fame ini di stop, kita panggil nanti Menteri ESDM, Pertamina Pimpinan dengan Menteri Perindustrian dan pengusaha sawit ini, untung enggak buat kita? Kalau, ini mungkin masukan ke bapak presiden yang salah. Kalau kita mau buat teknologi kita setuju, otomotif kita, kita ubah semua.

Jadi bahan bakunya Fame dari biodiesel ini, tapi biodiesel ini murah buat masyarakat, setuju. Merubah otomotif, membangun teknologi yang bagus, setuju tapi kalau dibuat begini mahal ya nggak bener dong, untuk memperingan semua perusahaan ini, perusahaan ini udah kaya-kaya semua, ngapain diperingan gitu, dikasih napas lagi, ini masyarakat yang harusnya dikasih keringanan. Ini BBM dinaikkan tinggi-tinggi, ini Fame disuruh beli mahal-mahal kan susah gitu loh.

Ini kita minta kepolisian dan kejaksaan meriksa Salim Group ini, iya bener di Riau itu bohong-bohong semua perusahaannya, saya udah pernah nemuin. Jawabannya cuman salah tanam, seberang jalan, seberang jalan sini sama seberang jalan sini, lalu kita datengin, loh nggak ada di peta, nggak ada di pelepasan kehutanan. Ada pelepasan tanah ini di Kehutanan, baru keluar HGU-nya, bener kan Pak. Jadi nggak bisa keluar HGU dulu, ada izin pelepasan dulu baru keluar HGU-nya.

Saya tahu semua ini, saya minta jujur aja, kalau nggak kita bentuk Panja Pimpinan. Kita panggil semua regulasi, kita buka ini seterang-terangnya, bukan hanya Menteri Perdagangan aja, Menteri Perindustrian pun bermasalah nanti, kenapa ditutup-tutupin gitu, membuat bapak presiden senang. Nawacitanya Bapak Presiden udah baik gitu, tapi regulasi ini salah menurut saya.

Ini sekarang harus membuat BBM naik lagi, kita nggak setuju. Ini banyak yang masih bisa direvisi, ini angkut Fame ini aja Pimpinan, ini selisihnya kalau Pertamina yang angkut ini dengan mereka yang angkut ini selisihnya 1 bulan 1 triliun. Kita minta ini diperiksa kepolisian, oleh kejaksaan, oleh KPK, selisihnya 1 triliun. Pengangkutan yang sekarang jumlahnya nilainya 3 triliun lebih sebulan, penawaran Pertamina cuman 2 triliun, belum lagi pembelian Fame-nya, ada lagi terbentuk dewan pembayarannya pakai dana PPKS iya, ini kan aneh gitu loh, kan enggak bener kalau kayak gini.

Saya minta di rapat berikutnya Pimpinan, kita hadirkan Menteri Perindustrian disini, Menteri ESDM disini, Dirjen Agro ini, Pertamina kita minta dibedah, regulasi ini bohong semua. Masa harganya sampai selisih 1 triliun kan aneh gitu, itu setiap bulan, belum lagi pembelian Fame-nya gitu.

Kalau namanya Pertamina regulasi, regulasi yang mengelola BBM serahkan aja ke Pertamina, ngapain mesti ada pihak-pihak lain lagi yang berkompeten di sini. Kalau mereka mau jual langsung aja ke Pertamina, kenapa mesti ada dewan lagi, PPTKS yang membayar di bawah Menteri Keuangan, ini kan nggak bener gitu.

Saya minta, izin Pimpinan, yang jual Fame di sini perusahaan mana aja.

Silakan, minyak goreng semua ya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Ada Fame, Fame siapa aja ini.

PT SMART:

Smart ada Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Berapa banyak Pak, sebulan.

PT SMART:

Sekitar 400 ribu sampai 500 ribu setahun.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

400.000 setahun, berarti 30.000an sebulan. Jadi CPO lainnya Bapak ekspor.

PT SMART:

Seperti tadi Pak, jadi yang itu ada minyak goreng.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Kan luas kebun Bapak bilang 120 ribu.

PT SMART:

105 Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Nanti kalau ada lebih serahkan masyarakat Riau ya.

PT SMART:

Jadi seperti tadi Pak, ada Fame, ada juga ekspor CPO yang sudah terbuka lagi, kemudian ada juga domestik minyak goreng.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Terus yang lain, Fame siapa lagi, Wilmar, iya Bapak sebut aja kan Bapak bisa kontak di situ berapa, saya lewatin. Terus yang ini Musimas.

PT MUSIMAS:

Di ekspor sebagian dan ke Pertamina sebagian.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Pertamina berapa banyak Bapak.

PT MUSIMAS:

Total Fame kita sekitar 1,9 juta ton per tahun, 1,9 juta.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Berarti perbulan.

PT MUSIMAS:

Bagi 12.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

100 ribu sekian.

PT MUSIMAS:

Iya tapi itukan tidak semua ke Pertamina Pak, tidak semua ke Pertamina, kita ekspor Fame Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Yang ke Pertamina berapa.

PT MUSIMAS:

Itu data nanti saya akan cek lebih lanjut.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Terus jumlah kebun Bapak berapa.

PT MUSIMAS:

120 ribu Pak, kita untuk memenuhi industri hilir kita di Grup Musimas hanya 10% dari kebun sendiri Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Berapa jumlah kebun Bapak.

PT MUSIMAS:

120.000 hektar.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Dimana lokasinya.

PT MUSIMAS:

Di Riau, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Selatan, Sumatera Barat.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Di Riau ada berapa Pak.

PT MUSIMAS:

Yang Bapak pernah kunjungi itu adalah 28 ribu hektar yang Musimas, kemudian Guntung Idamannusa itu 11.000 hektar di Inhill, itu saja kalau di Riau, 2.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Cuman 2 aja.

PT MUSIMAS:

Di Riau Cuma 2.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Plasmanya?

PT MUSIMAS:

Plasmanya lebih kurang di Riau adalah lebih kurang 3.000 hektar itu kan plasma kita lakukan bukan karena Permentan 26/2007. Artinya bukan kewajiban membangun plasma yang 20% sesuai Permentan karena sudah kita lakukan sebelumnya Pak. Kalau total plasma adalah 9.000 hektar.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Cuman di Pelalawan itu aja.

PT MUSIMAS:

Di Kalimantan Tengah ada plasma Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Nggak, yang di Riau.

PT MUSIMAS:

Di Riau cuman di Palalawan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Di kabupaten lain?

PT MUSIMAS:

Di kabupaten lain tidak ada, di Guntung Idamannusa di Inhill sedang pembangunan.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Izin Pimpinan nambahkan Pak Nasir, 1 menit.
Di Sumatera Selatan Pak.

PT MUSIMAS:

Berkat sawit sejati di **...(suara tidak jelas 1:46:34)**

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Berapa hektar?

PT MUSIMAS:

Itu 11.000 hektar.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, ini satu perusahaan ini kan ada 20 perusahaan didalamnya, ada bahkan lebih. Ini mau saya kita terbuka, berapa jumlah lahan kebun yang dikelola perusahaan masing-masing, jadi biar *clear* gitu loh.

Saya ada datanya karena saya dulu ketua panjangnya. Makanya bener juga itu ketangkap kemarin oleh kejaksaan Duta Palma itu, karena banyak perusahaannya, kebunnya yang tidak punya izin.

Kita terbuka aja gitu, saya juga punya konstituen di sana, saya tahu punya Bapak yang mana, izinnya yang mana, nggak ada izinnya karena minyak goreng kita langka, mahal.

Perusahaan ini hanya mementingkan kepentingan ekspornya saja, nggak ada mementingkan kepentingan negara ini. Dirjennya juga bukan ngurusin kepentingan negara, malah ngurusin kepentingan-kepentingan perusahaan saja menurut saya.

Jadi saya bisa minta Pimpinan, kita minta data Fame, kita mengundang Pertamina supaya kita tahu juga ini. Jadi Pertamina di undang, Dirjen Agro diundang nanti untuk menjelaskan berapa Fame, berapa CPO untuk minyak goreng, berapa yang di ekspor, berapa luasan lahannya.

Kita ingin keterbukaan aja, ini terlapor enggak ke negara kita semua karena hari ini Riau itu terbesar kelapa sawitnya dan semua perusahaan-perusahaan itu di belakangnya.

Jadi omong kosong kalau dibilang tadi cuma nggak sampai 1 juta karena saya tahu semua lokasi lahan-lahan ini. Kayak Wilmar ini, berapa jumlah lahan Bapak di Riau?

PT WILMAR:

Mohon maaf Pak, saya enggak menguasai kalau lahan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Saya tanya Ketua Asosiasi aja, berapa Pak jumlah kebun Wilmar?

SEKJEN GAPKI GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT

Kami terus terang tidak membawa data ya Pak, untuk satu-persatu perusahaan anggota. Jadi begini Pak, kami jelaskan bahwa perusahaan di Indonesia itu sekitar, perusahaan itu 2000 yang menjadi Anggota Gapki itu 718.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Termasuk Wilmar?

SEKJEN GAPKI GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT

Wilmar ada beberapa anggota juga, jadi kemudian dari 718 itu luasnya total kira-kira 3 juta Pak dari 9 juta hektar.

Jadi hanya 30% yang menjadi anggota Gapki, jadi kami nggak bisa menyampaikan itu karena saya tidak membawa data masing-masing perusahaan, jadi tidak bisa menyampaikan disini begitu Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, interaktif sedikit.

Jadi Wilmar masuk di asosiasi Pak?

SEKJEN GAPKI GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT

Masuk anggota, anggota Gapki.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Anggota Gapki, kalau dari data Bapak berapa dia laporkan kan udah masuk anggota, yang tidak bisa terlaporkan kan nggak masuk anggota.

SEKJEN GAPKI GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT

Maaf sekali lagi mohon maaf, saya tidak membawa data masing-masing perusahaan tersebut. Sehingga saya tidak, saya takut nanti salah kalau saya menyampaikan luasan itu, kecuali kalau saya bawa datanya, bisa saya sampaikan begitu Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Mungkin Pimpinan, udah pendalaman lah ya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, Pak saya nggak ngerti nanti jadinya Bapak diundang ke sini untuk apa karena kan kita ini mau melakukan pendalaman, seharusnya kan Bapak bawa data 10 besar perusahaan ini. Mungkin yang ada di Bapak ini mungkin 5 atau 7. Harusnya kan Bapak paham berapa jumlah kebunnya.

KETUA RAPAT:

Atau begini Pak Nasir, saya tengahin kalau nggak ntar disampaikan secara tertulis saja kan, berapa data yang ditanyakan temen-temen Anggota. Intinya dari semua pertanyaan kami ingin memastikan pasokan, untuk catatan minyak goreng untuk masyarakat dan distribusinya tercukupi. Kalau terkait lahan apa itu sifatnya pendukung saja dan itu bisa dijawab secara tertulis ntar, termasuk juga Pak Salim, *Mister Franky sorry*. Saya nggak kenal kayaknya yang lebih mengenal nih Pak Gunhar ini kan sama Pak Nasir, mohon maaf Pak Franky ya. Saya tidak mengenal soalnya saya di Komisi VII baru 1 tahun ini Pak gitu.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, meluruskan sedikit Pimpinan.

Jadi saya izin melalui Pimpinan, kalau bisa memang untuk pendalaman masalah minyak goreng dan seluruh regulasi kelapa sawit ini kita bentuk Panja saja karena ada beberapa hal yang harus kita alami. Masalahnya soal Fame tadi, Fame ini penting karena saya melihat, kami sangat keberatan dengan naiknya BBM ini karena harusnya ada koreksi masalah Fame tadi.

Harusnya pemerintah menghilangkan pembelian Fame dulu, baru melakukan evaluasi tentang BBM, harusnya itu karena itu sangat besar *cost*-nya dan ini bisa membantu sebenarnya regulasi ini supaya lebih ringan. Bagaimana keuntungan Fame ini, sebenarnya keuntungannya buat negara gitu, bukan keuntungannya dibuat perusahaan-perusahaan ini.

Harga Fame ringan segini, harga CPO rendah begini, harga CPO untung dia nggak turun-turun gitu loh, kan aneh, bener kan Pak. Bapak bilang Bapak nggak jual Fame, Pak Franky ini ya udah itu masalahnya. Inikan masalah Fame yang saya sampaikan. Jadi iya kan, jadi Pak Franky ini apa? kalau kita andaikan macam gitar Spanyol, di tengok aja dipegang nggak bisa.

Jadi itu Pimpinan, jadi saya berharap Fraksi Demokrat untuk mengevaluasi kenaikan harga BBM ini, kami minta pemerintah meninjau kembali tentang regulasi fame tersebut, yang pertama.

Yang kedua, kami minta data-data semua perusahaan penyuplai minyak goreng ini untuk mengeluarkan jumlah luasan lahan dan hasil produksi, berapa jumlah produksi yang dihasilkan dari semua permasalahan tersebut.

Nanti kami juga dari yang memiliki Dapil masing-masing, yang punya regulasi tentang tanaman kebun mereka, kami juga akan mempersiapkan data-data tersebut dan kita bisa *appel to apple* tapi kami mohon izin Pimpinan, supaya Panja nanti yang kita sampaikan ini bisa merubah harga BBM untuk dilakukan perubahan oleh pemerintah karena masyarakat sangat, hari ini sangat kesusahan, apalagi memang kondisi ekonomi kita belum stabil.

Tapi saya berharap kalau Bapak Jokowi juga bisa melakukan perubahan ini dan bisa menghentikan produksi Fame ini tidak dibelikan, tidak diproduksi lagi oleh Pertamina karena ini beban berat bagi Pertamina memang tidak ada keuntungan maupun margin yang diperoleh oleh Pertamina tersebut. Kalau memang ada dana PPKS bagus dibangun untuk infrastruktur saja atau untuk meringankan subsidi tersebut, bukan untuk memberikan yang kaya tambah kaya.

Mungkin itu masukan yang kami sampaikan, lebih dan kurang kami sudahi.

Wabillahit Taufik wal hidayah.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi VII yang sudah melakukan pendalaman.

Tapi sebelum saya berikan kesempatan ini, Pak Franky dan terhadap 10 saya pengen tahu ini Pak, *brand*-nya masing-masing karena saya suka belanja itu Pak. Pak Franky itu merknya apa ya Pak? Bimoli, baru kenal Pak Franky, Bimoli. Jadi saya kalau ingat Bimoli itu Pak Franky, pasti. Sebelahnya merknya apa Pak.

PERWAKILAN PERUSAHAAN MINYAK GORENG:

Sunco Pak.

KETUA RAPAT:

Yang kayak gambar jagung itu ya, oke, saya sering ke pasar soalnya.

PERWAKILAN PERUSAHAAN MINYAK GORENG:

Sania sama Fortune Pak.

KETUA RAPAT:

Sania, Fortune.
Sebelahnya Pak.

PT SMART:

Filma dan Kunci Mas.

KETUA RAPAT:

Filma saya suka pakai Filma, berarti kasih sumbangan ke Smart nih.
Sebelahnya?

PT WINGS:

Dari Wings itu Sedap dan Sabrina Pak.

KETUA RAPAT:

Sedap dan Sabrina, di Jakarta ada nggak itu?

PT WINGS:

Sedap ada Pak.

KETUA RAPAT:

Mungkin saya yang belum ini, yang lain sering suplai lah ke wilayah saya biar kita tahu. Maksud saya mengetahui merk-merknya jadi ketika di pasar, saya soalnya kalau *weekend* itu suka ke pasar Pak. Satu, pengen lihat harga emang betul nggak termasuk kayak kelangkaan kemarin itu sampai Rp. 40.000 kan botol besar.

Jadi kita denger percakapan ibu-ibu, Bapak coba lain kali. Makanya tadi kalau apa yang disampaikan Pak Ramson, itu betul Pak. Kita ini sering sekali termasuk pemerintah, semua lah, kita semua setiap kita membuat kebijakan jangan tolak ukurnya perut kita, tapi harus tolok ukurnya rakyat kecil. Saya mendengar percakapan ibu-ibu di pasar kan, begitu minyak harganya sampai Rp. 50.000 waktu itu, mereka ngocehnya bagaimana, saya dengerin aja.

Jadi begitu berharganya nilai uang, walaupun mungkin sebagian mungkin bagi Bapak-Bapak Rp. 50.000 hanya buat ongkos parkir kan, tapi buat masyarakat tidak seperti itu Pak, khususnya masyarakat kecil. Kayak contoh ini kami besok, kami tidak merasa menyetujui kompor induksi, tiba-tiba di klaim kami menyetujui, kami di complain.

Inilah jangan membuat kebijakan atau melakukan hanya keuntungan pribadi atau golongan, atau korporasi sesaat kan tapi kita harus memikirkan kepentingan masyarakat, terutama daya jangkauannya, jangan ukuran perut kita disamakan dengan ukuran rakyat-rakyat yang tidak mampu.

Jadi buat kita semua, apa yang tadi disampaikan Pak Ramson betul, jangan hanya berpikir hanya keuntungan semata karena ada sudah diatur bagian yang untuk di ekspor mana bagian ini dan untuk hari ini kita memang agendanya terkait minyak goreng.

Jadi kita fokus terhadap apa namanya diskusi terkait minyak goreng, kalau terkait lahan, terkait ini, itu ntar bisa dijawab secara tertulis saja. Dan untuk Pak Franky karena dengan tegas bilang kami tidak menjual Fame, iya memang di sini kita bicara minyak goreng Pak.

Mungkin itu sedikit dari saya, saya persilahkan Pak Dirjen untuk memberikan jawaban singkat terhadap pertanyaan-pertanyaan temen-temen dan untuk selanjutnya kita akan tutup setelah itu Pak.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Terima kasih Pimpinan.

Kalau dari catatan saya semua udah dijawab Pak, tapi untuk jelas sama tidaknya nanti demikian Pak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih atas penjelasan dari Pak Dirjen yang akan dilengkapi berdasarkan juga masukan dari teman-teman asosiasi dan mohon maaf kepada seluruh mitra kami kan, termasuk Bapak/Bapak, Ibu tadi disampaikan oleh kawan-kawan, bahwa Bapak/Ibu punya tugas mulia juga, tidak hanya kami DPR RI, Bapak juga punya karena ketersediaan minyak goreng ada di pundak Bapak-bapak.

Kami berharap seluruh perusahaan, khususnya 10 perusahaan ini punya niat baik dan punya hati nurani untuk memberikan sumbangsih kepada negeri kita, khususnya terhadap pemenuhan minyak goreng dalam negeri.

Jadi untuk itu saya atas nama Pimpinan, sebelum menutup rapat kami berikan kesempatan dulu terhadap Pak Dirjen untuk mewakili dan juga dari salah satu perusahaan dan juga asosiasi untuk memberikan *closing statement*.

Silakan Pak Dirjen.

DIRJEN AGRO KEMENPERIN RI:

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Jadi terima kasih banyak atas saran, masukan untuk menjaga industri ini bisa terutama tadi dalam rangka normalisasi, ini dalam rangka normalisasi dulu Pak, normalisasi proses produksi karena hingar-bingarnya yang kemarin. Mudah-mudahan ini akan bisa menstabilkan proses produksi industri dan industri ini bisa berkembang karena potensinya yang cukup luar biasa besarnya di dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita, pekerjaan bagi masyarakat dan pengembangan daerah-daerah yang kami sebutkan tadi ini sangat menjadi hal yang penting.

Demikian Pak Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Mungkin Pak Ketua Asosiasi bisa singkat memberikan *closing statement*.

SEKJEN GAPKI GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT

Baik, terima kasih.

Jadi sekali lagi bahwa kami juga sebenarnya berharap Pak dari 2.000 perusahaan itu bisa semua menjadi Anggota Asosiasi. Namun sekarang kondisinya baru 30%.

Kami juga mohon maaf kami tidak menyampaikan data yang diminta tadi karena memang di agenda tersebut masalah minyak goreng, sehingga kami tidak menyiapkan tapi kami akan siap untuk memberikan tertulis, anggota kami masing-masing berapa luasannya.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, mungkin saya pikir perusahaan bisa diwakili oleh Pak Asosiasi ya.

SEKJEN GAPKI GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT:

Mohon izin Pak Ketua, tapi itu hanya yang Anggota ya Pak. Jadi kami tidak bisa menyampaikan yang non anggota.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ini buat catatan penting Bapak Dirjen ternyata ada berapa 2.000 lebih dan ini yang harus kita ketahui, apakah ikut asosiasi lain ataukah memang hanya satu wadahnya ini asosia. Kalau memang mereka tidak punya asosiasi, dihimbau atau ada satu aturan regulasi dari Kemenperin untuk mewajibkan ikut asosiasi agar memudahkan koordinasinya, jadi biar tidak liar lah Pak gitu kan, jadi itu ya Pak Dirjen ya.

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dirjen, Ketua Asosiasi Gapki, Gimny dan Aimi dan juga kepada 10 perusahaan produsen minyak goreng, diantaranya PT Wilmar, PT Smart, Musimmas, Apikal, Permata Hijau, Incasi, Salim, BKP, KPM dan Wings atas kesediaannya untuk hadir dalam rapat dengar pendapat hari ini.

Dan juga kami atas nama Pimpinan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi VII, baik yang hadir fisik maupun hadir secara virtual dan kepada seluruh mitra. Atas nama Pimpinan, jika ada hal-hal yang kurang berkenan mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Dirjen Industri Agro Perindustrian pada hari ini saya nyatakan ditutup.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.55 WIB)

a.n. Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002